

PENERAPAN PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DALAM MEMBERDAYAKAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN SUKABUMI

THE IMPLEMENTATION OF MINAPOLITAN FISHERIES PROGRAM FOR EMPOWERING SMALL FISHERMEN IN SUKABUMI

Masyhuri Imron

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
Anggota Kelompok Studi Maritim
mr_hoeng@yahoo.com

Abstract

Minapolitan is marines and fisheries development concept based on area economic management emphasizing on fisheries comodities. Minapolitan program intends to increase qualified fisheries production as well as community income. This paper aims to describe the implementation of Minapolitan program in Sukabumi regency; whether the program has already directed to empower small fishermen. The result shows that the activities of Minapolitan program are unfocused. Everything related to fisheries issues, even those unrelated ones, are considered as a part of Minapolitan program. The implementation of Minapolitan program undertaken by local governments and coastal development program are no different. Both capital and fishing equipment support for small fishermen has not been directed to increase the production of qualified comodities. The empowerment of small fisheries in Minapolitan program has not been interconnected with the purpose of Minapolitan program in this area, namely the increasing of four higher grade fish comodities, including Tuna, Tongkol, Cakalang and Layur.

Keywords: *Minapolitan, Catching Fisheries, Empowerment, Small Fishermen.*

Abstrak

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan, dengan komoditas unggulan berupa perikanan. Program Minapolitan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perikanan unggulan, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tulisan ini untuk melihat penerapan program Minapolitan di Kabupaten Sukabumi, apakah sudah diarahkan untuk memberdayakan nelayan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di dalam program Minapolitan di Sukabumi belum fokus. Semua yang terkait dengan masalah perikanan dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan, bahkan program yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perikanan tangkap. Jadi tidak ada perbedaan antara program Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan program pembangunan pesisir. Program bantuan permodalan dan peralatan tangkap untuk nelayan kecil belum diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan. Dengan demikian, pemberdayaan nelayan kecil di dalam program Minapolitan masih terlepas dari tujuan program Minapolitan di daerah ini, yaitu meningkatkan produksi empat jenis komoditas ikan unggulan, yaitu Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur.

Kata kunci: Minapolitan, Perikanan Tangkap, Pemberdayaan, Nelayan Kecil.

Pendahuluan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan, dengan komoditas unggulan berupa perikanan (Suhaeni, dkk., 2014).¹ Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, konsep Minapolitan

ini mirip dengan konsep agropolitan,² sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalam Pasal 1 angka 25 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

¹Kata Minapolitan berasal dari kata 'mina' yang berarti perikanan dan 'politan' atau 'polis' yang berarti kota. Jadi berdasarkan asal katanya, Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota.

²Menurut Dewa Gede Raka (2011), perbedaan utama antara keduanya terletak pada sektor penggerakannya. Jika agropolitan sektor penggerakannya adalah pertanian, maka pada minapolitan sektor penggerakannya adalah perikanan

perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.³

Program Minapolitan yang mulai dijalankan pemerintah sejak tahun 2011 itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan nelayan. Minapolitan ini merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Hal itu didasarkan pada satu visi, yaitu agar Indonesia dapat menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan disebutkan bahwa ada tiga tujuan Minapolitan, yaitu: *Pertama*, meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan; *kedua*, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata; *ketiga*, mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Walaupun program Minapolitan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perikanan, namun tidak semua komoditas perikanan didorong untuk meningkat produksinya, melainkan diprioritaskan pada komoditas unggulan, yaitu ikan yang berorientasi ekspor. Hal itu karena pembangunan Minapolitan berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), yang dapat menembus batas kawasan Minapolitan, bahkan kabupaten/kota, provinsi dan negara, untuk mencapai pasar global, yang tentunya harus dilalui melalui persaingan yang ketat.

Konsep pengelolaan Minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun

³Konsep agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Friedmann, dengan lebih menekankan pada re-alokasi produksi primer melalui pembungunan desa. Melalui konsep ini, kaitan (*linking*) antara desa dan kota di tingkat lokal sangat ditekankan (Friedmann & Douglass, 1978). Konsep ini juga merupakan kritik terhadap strategi pertumbuhan ekonomi konvensional yang gagal membawa kemajuan desa (Buang, dkk., 2011). Menurut Douglass, kegagalan itu terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidak diarahkan agar dapat memberikan dampak pertumbuhan wilayah *hinterland* atau kawasan sekitarnya (Douglass, 1981).

sistem manajemen perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Disamping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Unit Pengolahan Ikan, Pabrik Es dan Unit Pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan.

Permasalahannya adalah, peningkatan produksi untuk komoditas unggulan yang berorientasi ekspor itu akan lebih mudah dilakukan oleh nelayan yang memiliki peralatan tangkap modern. Untuk itu, agar nelayan kecil dapat meningkatkan produksinya berupa komoditas ikan unggulan, tentunya nelayan kecil juga harus ditingkatkan peralatan tangkapnya. Pertanyaannya, apakah di dalam program Minapolitan di Palabuhanratu, nelayan kecil sudah diarahkan untuk menjadi nelayan yang mampu memenuhi target peningkatan produksi ikan unggulan tersebut? Oleh karena produksi ikan unggulan di wilayah Palabuhanratu berupa Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur, sejauhmana program Minapolitan di Palabuhanratu disiapkan untuk mendukung perubahan nelayan kecil agar bisa menjadi nelayan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan melalui penangkapan ikan Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur tersebut? Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penerapan Program Minapolitan di Sukabumi

Program Minapolitan merupakan program pemerintah pusat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Di dalam Keputusan Menteri tersebut, Kabupaten Sukabumi termasuk yang ditetapkan sebagai salah satu dari kawasan Minapolitan.

Hal yang spesifik dari pelaksanaan program Minapolitan adalah pendekatan yang digunakan, yaitu didasarkan pada pendekatan sistem dan manajemen kawasan. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan program Minapolitan tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau oleh Pemerintah

Daerah, tetapi dilakukan secara terpadu antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di level Pemerintah Pusat, pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan juga dilakukan oleh beberapa instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat (sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur perbankan. Meskipun

demikian, kendali program tetap berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai koordinator kegiatan. Dengan demikian, koordinasi atau sinergi dari berbagai pihak merupakan elemen penting di dalam program Minapolitan. Sinergi dengan pemerintah daerah misalnya, dilakukan dengan mendorong agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, dan tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kelembagaan Minapolitan juga meliputi berbagai elemen, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Elemen, Peran dan Fungsi Kelembagaan Minapolitan

No	Elemen	Peran dan Fungsi
1	Kelompok Nelayan	Memiliki peran sebagai pelaku usaha perikanan ditingkat lapangan yang bersentuhan langsung dengan proses produksi. Fungsi sebagai simpul produksi.
2	Pengumpul/Bandar (hasil perikanan)	Secara alami memiliki peran penghubung/distribusi antara sentra produksi dan pasar. Fungsi sebagai simpul distribusi.
3	PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan)	Memiliki peran pendampingan serta membantu dan mentransformasikan pengetahuan dan skill terkait dengan pengembangan perikanan secara umum. Fungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan perikanan
4	Pengusaha Industri Pengolahan/pendukung (<i>Entrepreneurs</i>)	Berperan sebagai pelaku usaha bisnis yang terkait dengan pengembangan aktivitas perikanan. Fungsi sebagai salah satu elemen penting dalam penciptaan nilai tambah hasil perikanan.
5	SKPD 1: Dinas Kelautan & Perikanan	Mendukung dan melakukan fasilitasi pengembangan perikanan dan kelautan secara umum.
6	SKPD 2: Dinas PU (pekerjaan umum)	Mendukung dan melakukan fasilitasi penyediaan infrastruktur terkait dengan pengembangan sektor perikanan dan kelautan
7	SKPD 3: Bappeda	Mendukung dan melakukan sokongan kebijakan daerah mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan berbasis Minapolitan.
8	Pemerintah lokal 1: Kecamatan	Simpul pemerintah lokal yang berperan dan bersentuhan langsung dengan <i>stakeholders</i> di lapangan.
9	Pemerintah lokal 2: Desa	

Untuk melaksanakan program Minapolitan, institusi di tingkat provinsi tidak terlibat langsung tetapi hanya melalui dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas teknis di kabupaten. Hal ini berbeda dengan instansi pusat yang melaksanakan langsung program Minapolitan di daerah, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki di daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya, melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Sebagai kawasan inti pengembangan Minapolitan, PPN memiliki program kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Begitu pula Kementerian Perumahan Rakyat, memiliki program memperbaiki rumah nelayan tidak layak huni sebanyak 280 unit; Badan Pertanahan Nasional melakukan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan sebanyak 250 bidang tanah;

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memberi bantuan kapal ikan 3 GT sebanyak 3 unit, Kementerian Sosial memberikan bantuan beras nelayan. Beberapa program lainnya yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk sarana melaut dan prasarana fisik perikanan, meliputi:

- (a) Bantuan 10 unit kapal motor Inka Mina di atas 30 GT.
- (b) Bantuan sembilan unit kapal rumpon di atas 10 GT.
- (c) Bantuan 28 unit kapal *multipurpose* (3GT) untuk nelayan Cisolok, Palabuhanratu, Ciwaru, dan Ujung Genteng.
- (d) Bantuan dua unit keramba jaring apung di Cibangban dan 4 unit jaring apung di Sangrawayan.
- (e) Peningkatan infrastruktur PPI.

- (f) Pembuatan pabrik es dan *cold storage*.
- (g) Perbaikan 307 unit rumah tidak layak huni di Cisolok dan Ciemas.
- (h) Penyambungan 729 PLN.
- (i) Pembuatan jalan poros desa/produksi sepanjang 8 KM dan sanitasi di lingkungan Ciwaru.

Selain dalam bentuk sarana melaut dan prasarana fisik perikanan, bantuan juga diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk akses kredit nelayan, yaitu:

- (a) Penyaluran kredit nelayan senilai Rp.19,5 Milyar dalam program KKMB (via BNI, BRI, BJB, BTPN, Pegadaian dan Bank Mandiri).
- (b) Bantuan kredit Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) kepada 56 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Indonesia.
- (c) Pembuatan sertifikat tanah sebanyak 1.050 bidang di Cikahuripan, Cidadap, Simpenan dan Ciwaru.
- (d) Pembuatan kartu nelayan sebanyak 4.940 buah.

Beberapa instansi sektoral lain juga terlibat dalam kegiatan Minapolitan, seperti Kemenpora berupa program rumah layak huni sebanyak 727 rumah, dan BPK memberikan sertifikat tanah nelayan sebanyak 1.250 sertifikat, dan Kementerian Sosial berupa program bantuan beras rumah tangga nelayan pada musim paceklik. Ketiga instansi tersebut paling lama memfasilitasi nelayan dalam program Minapolitan. Sedangkan, PLN/ ESDM baru dua tahun terakhir memberikan pemasangan instalasi listrik kepada 629 rumah nelayan. Begitu pula Kementerian PDT memberikan bantuan kapal (tiga buah berbobot 3GT) dan keramba jaring apung delapan buah).

Sebagai program pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan, program Minapolitan memanfaatkan kawasan pelabuhan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Palabuhanratu ditetapkan menjadi kawasan inti, sedangkan beberapa lokasi pelabuhan yang lebih kecil (PPI), ditetapkan sebagai kawasan penyangga untuk program Minapolitan. Dengan demikian, program Minapolitan di wilayah Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi dua zona, yaitu zona inti dan zona pendukung. Zona inti merupakan zona yang berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun zona pendukung tersebar di sentra-sentra

perikanan yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi selain Palabuhanratu, yaitu: Kecamatan Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Cibitung, Ciracap, Surade, dan Tegalbuleud.

Sebagai kawasan ekonomi unggulan, program Minapolitan di Kabupaten Sukabumi telah menetapkan komoditas utama untuk perikanan tangkap, yaitu Tuna, Cakalang, Tongkol dan Layur. Ada dua alasan yang mendorong empat jenis ikan tersebut dijadikan target peningkatan produksi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pertama, wilayah laut di daerah ini dianggap memiliki potensi yang cukup besar keempat jenis ikan tersebut. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi ikan tuna di Kabupaten Sukabumi sebesar 4.458.709 kg (nilai produksi Rp.136.147.418.840), Cakalang 1.199.913 kg (nilai produksi Rp.16.411.117.779), dan Tongkol 1.177.889 kg (nilai produksi Rp.8.374.754.947). Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2011, yaitu tuna 3.502.497 kg, Cakalang 864.739 kg, dan Tongkol 563.051 kg (Kepala PPN Palabuhanratu). Kedua, empat jenis ikan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

Sasaran akhir peningkatan produksi empat jenis ikan tersebut adalah pengembangan komoditi hasil ekspor perikanan, yang merupakan salah satu dari tujuan Minapolitan. Adapun jumlah produksi ikan layur di wilayah Kabupaten Sukabumi menurut data di PPN Palabuhanratu setiap tahunnya tidak kurang dari 185,47 ton dengan nilai produksi hasil perikanan rata-rata sekitar Rp1.153.400.038 per tahun. Permintaan ekspor ikan layur umumnya ke Cina, Jepang dan Korea (Tri Wiji Nurani, Ardani dan Ernani Lubis, 2014). Adapun pasar ekspor ikan Tuna dan Tongkol terbesar adalah ke Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Selain itu, juga ke beberapa negara Asia seperti Vietnam, Singapura, Hongkong dan Taiwan.

Tabel 2
Peningkatan Produksi Ikan Tuna, Tongkol dan Cakalang Tahun 2011–2012

No	Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Kg)		Persentase Kenaikan
		2011	2012	
1	Tuna	3.502.497	4.458.709	27,30
2	Tongkol	563.051	1.177.889	109,19
3	Cakalang	864.739	1.199.913	38,76
Jumlah		4.930.287	6.836.511	38,66
Sumber: Bahan presentasi Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu: Pelaksanaan Industrialisasi Perikanan Tangkap berbasis Pelabuhan Perikanan				

Karakteristik Nelayan Kecil di Kabupaten Sukabumi

Sebagian besar nelayan di Kabupaten Sukabumi merupakan nelayan yang menggunakan perahu motor tempel di bawah 5 GT atau menggunakan perahu tanpa motor. Jumlah mereka mencapai 1.252 rumah tangga perikanan (RTP), atau 93,71% dari seluruh RTP di wilayah Kabupaten Sukabumi (tabel 4). Mengacu pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka nelayan dengan kapasitas seperti itu (kapasitas kapalnya maksimal 5 gros ton) disebut nelayan kecil.⁴

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa nelayan kecil di Kabupaten Sukabumi tersebar di semua Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Sedangkan nelayan yang tidak termasuk sebagai nelayan kecil hanya terdapat di wilayah Palabuhanratu dan Ujung Genteng. Itu pun yang kapasitas kapalnya di atas 10 GT hanya ada di TPI Palabuhanratu.⁵

Nelayan-nelayan kecil seperti itu beroperasi di wilayah pantai, sehingga ikan yang diperoleh juga jenis ikan pantai yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Kembung, Loang, Peda, dan beberapa jenis ikan pelagis kecil lainnya. Memang mereka juga bisa menangkap layur, namun jumlahnya tidak banyak. Karakteristik perikanan tangkap lainnya di wilayah Sukabumi

⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mendefinisikan nelayan kecil secara lebih luas, yaitu nelayan yang menggunakan kapal paling besar 10 GT. Jika mengacu pada undang-undang tersebut, maka jumlah nelayan kecil di Kabupaten Sukabumi menjadi lebih banyak lagi. Menurut Garcia dan Rosenberg (2010), karakteristik nelayan kecil (*small-scale fishery*) antara lain dapat dilihat dari kapasitas penangkapan (*fishing capacity*), lokasi jaringan produksi, dan lokasi pendaratan kapal ikan. Walaupun sama-sama menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, namun Berkes, et. al. (2001) membedakan nelayan kecil menjadi dua kategori, yaitu nelayan *subsisten* dan nelayan *artisanal*. Pada nelayan subsisten, penangkapan ikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan, dan jika ada kelebihan baru dijual. Adapun nelayan artisanal cenderung berorientasi pada pasar.

⁵Pada umumnya kapal di atas 10 GT yang berada di TPI Palabuhanratu itu bukan milik masyarakat setempat, tetapi milik nelayan pendatang yang beroperasi di kawasan perairan Palabuhanratu.

adalah dominannya penggunaan alat pancing ulur, yang tersebar di semua TPI, terutama di Palabuhanratu, Ujung Genteng, Cisolok, Ciawaru dan Cibangan. Ikan yang bisa ditangkap menggunakan pancing ulur memang bervariasi, seperti Tongkol, Cakalang, Kembung (*Rastreliger Kanagurta*), Layang (*Decapterus Russelli*), Bawal (*Pampus Chinensis*), Kakap (*Lutjanus Sp*), dan lain sebagainya. Begitu pula ikan yang berukuran besar seperti Hiu (*Carcharhinus Longimanus*), Tuna (*Thunnus Sp*), Marlin dan lain sebagainya kadang juga tertangkap, namun jumlahnya juga tidak banyak.

Alat tangkap lain yang dominan digunakan nelayan kecil di Kabupaten Sukabumi adalah jaring rampus/klitik yang digunakan untuk menangkap Udang dan jenis kan demersal seperti: Teri (*Anchovies*), Sunglir (*Rainbow runner*), Cucut sorah (*Spot tail shark*), Ikan Lidah (*Rongve soles*), Udang Krosok (*Tiger Cat Shrimp*), Belanak (*Mangrove mullets*), Udang putih (*Banana prawa*), Rajungan (*Swimming crabs*), Udang dogol (*Endeavour prawn*), Kurisi (*Threadfin bream*) dan Bawal hitam (*Black pomfret*). Beberapa jenis ikan lain yang cukup besar juga ikut tertangkap, seperti Tongkol krai (*Frigate tuna*), Ikan Napoleon (*Napoleon wrasse*), Tenggiri (*Narrow barred spanish mackerel*), Kakap merah (*Red snapper*), Layur (*Hair tails*) dan Cakalang (*Skipjack tuna*), namun tidak sebanyak yang disebut terdahulu.

Walaupun banyak peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Sukabumi, namun yang dapat diarahkan untuk mendukung program Minapolitan hanya beberapa, yaitu *Purse seine*, Rawai tuna dan Pancing tonda, yang jumlah keseluruhan hanya 218 unit, atau sekitar 7,93%. Melihat data hasil perikanan yang ada di PPN Palabuhanratu, diketahui bahwa jenis Ikan Tuna merupakan hasil tangkapan yang jumlahnya sangat dominan, dan menjadi andalan perikanan ekspor di PPN Palabuhanratu. Namun produksi tuna tersebut sebagian besar tidak merupakan hasil nelayan Sukabumi, tetapi hasil tangkapan armada perikanan skala besar (10-30 GT) dan di atas 10 GT yang berasal dari luar daerah, yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.⁶

⁶Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan tempat berlabuh berbagai armada perikanan tangkap dari berbagai ukuran, baik perikanan berskala kecil maupun besar yang berasal dari lokal maupun luar

Dengan jenis peralatan tangkap yang seperti itu, maka walaupun program Minapolitan telah menetapkan empat jenis komoditas utama perikanan tangkap, namun hasil tangkapan yang dominan di desa-desa yang berada di kawasan penyangga program Minapolitan cenderung bukan komoditas unggulan yang menjadi sasaran program Minapolitan di Sukabumi, tetapi jenis ikan lainnya. Hanya nelayan di Palabuhanratu yang peralatannya memadai untuk mendukung program Minapolitan (yaitu memiliki kemampuan untuk menangkap ikan Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur) dan sebagian nelayan di Kecamatan Cisolok. Hal itu karena perikanan tangkap di Kawasan Minapolitan Sukabumi lebih banyak didominasi oleh perikanan pantai, seperti ikan Tembang, Teri, Layur, dan beberapa jenis ikan lainnya.⁷

Berbagai jenis peralatan tangkap tersebut menunjukkan bahwa program Minapolitan di Kabupaten Sukabumi yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi dengan produk utama dari usaha perikanan tangkap tersebut kurang didukung dengan sarana penangkapan yang dimiliki oleh para nelayan. Selain armada perikanan yang digunakan umumnya berbobot di bawah 10 GT dan perahu yang digunakan tidak bermotor, alat tangkap yang dikembangkan juga sangat beragam, dan setiap lokasi memiliki alat tangkap yang tidak mendukung untuk pengembangan penangkapan empat komoditas ikan unggulan Minapolitan di daerah ini. Memang ada alat tangkap yang ada di semua lokasi penyangga perikanan, seperti *jaring kincang* yang di setiap desa terdapat sekitar 5-8 alat tangkap, juga jaring payang yang jumlahnya mayoritas di wilayah Kabupaten Sukabumi, namun dua jenis jaring tersebut tidak untuk menangkap ikan Tuna, Cakalang, Layur, dan Tongkol.

Beberapa desa perikanan walaupun mengembangkan peralatan tangkap yang spesifik, namun tidak mendukung peningkatan penangkapan empat jenis komoditas ikan tersebut, yaitu Tuna, Cakalang, Tongkol, dan

daerah. Kehadiran armada perikanan berskala besar dari luar tersebut merupakan konsekuensi dari pertumbuhan kawasan ekonomi pelabuhan perikanan yang bertipe nasional. Bersandarnya kapal-kapal dari luar daerah itulah yang ikut andil menambah jumlah produksi ikan di Kabupaten Sukabumi.

⁷Lihat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011. Penyusunan Business Plan Kawasan Penunjang Minapolitan Palabuhanratu dan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi.

Layur. Bagan rakit misalnya, dijadikan peralatan tangkap unggulan di Cibangban; bagan apung di Cibangban dan Palabuhanratu; pancing rawai di Palabuhan ratu dan Ujung Genteng; jaring rampus di Ujung Genteng dan Minajaya; jaring insang hanya di Ujung Genteng. Sedangkan pancing rawai dan tonda yang digunakan untuk menangkap ikan Tuna di Sukabumi hanya banyak digunakan oleh nelayan Palabuhanratu dan Ujung Genteng.

Semua desa perikanan di wilayah Sukabumi yang merupakan wilayah penyangga Minapolitan, jalur pemasaran hasil tangkapannya semuanya menuju ke wilayah inti, yaitu PPN Palabuhanratu. Oleh karena itu, apabila masyarakat nelayan di wilayah penyangga tidak banyak menghasilkan komoditas unggulan, maka dapat dipastikan bahwa produk ikan unggulan yang berada di PPN Palabuhanratu itu sebagian besar bukan produksi nelayan lokal. Dengan kata lain, nelayan kecil yang berlokasi di wilayah penyangga kawasan Minapolitan kurang memiliki kemampuan mendukung program Minapolitan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa permasalahan perikanan tangkap yang dihadapi oleh nelayan kecil dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi adalah, sebagian besar hasil tangkapan nelayan kecil yang berada di desa-desa pesisir tidak mendukung komoditas yang menjadi target program Minapolitan Palabuhanratu. Selain disebabkan sarana penangkapan yang kurang mendukung program Minapolitan, prasarana perikanan yang ada di wilayah penyangga juga sangat minim. Di PPI Cikembang misalnya, prasarana jalan sangat buruk sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Akibatnya, nelayan Cikembang mengalami kesulitan untuk mendistribusikan hasil tangkapan mereka ke luar area PPI Cikembang. Selain itu, fasilitas penunjang lainnya yang menjadi dasar terbangunnya sebuah Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan masih sangat minim.

Sumbangan nelayan Sukabumi dalam penangkapan Tuna, Tongkol dan Cakalang yang terbanyak adalah melalui pemancingan, yang banyak dilakukan di laut bebas atau di rumpon, dengan kedalaman sekitar 30 meter. Ada sekitar 150 rumpon di wilayah ini yang dimiliki oleh nelayan lokal. Oleh karena biaya pembuatan rumpon tergolong mahal, maka nelayan cenderung membuat rumpon dengan cara *sharing* dana antara beberapa nelayan. Oleh

Tabel 4
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Laut Tahun 2014

No.	TPI	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel < 5 GT	Bobot Perahu				Jumlah
				5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	31-50 GT	
1	Palabuhanratu	223	444	27	11	39	2	746
2	Cibangban	15	108	-	-	-	-	123
3	Cisolok	-	225	-	-	-	-	225
4	Ciwaru	7	153	-	-	-	-	160
5	Minajaya	-	19	-	-	-	-	19
6	Ujunggenteng	8	50	5	-	-	-	63
Total		253	999	32	11	39	2	1.336

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Tabel 5
Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Menurut Lokasi di Kabupaten Sukabumi (Tahun 2014)

No	Jenis Alat Tangkap	P.Ratu	Cisolok	Minajaya	Cibangban	Ciwaru	U. Genteng	Jml
1	Payang	50	30	-	13	-	1	94
2	Dogol/Lempara Dasar	20	-	-	-	20	-	40
3	Purse science	4	-	-	-	-	-	4
4	Jaring insang hanyut	126	-	-	-	15	14	155
5	Jaring rampus/klitik	43	70	33	-	-	320	466
6	Jaring tiga lapis/Tramelnet	20	-	-	-	10	-	30
7	Bagan perahu/rakit	230	-	-	27	117	-	374
8	Bagan Tancap	-	-	-	-	77	-	77
9	Rawai tuna	40	-	-	-	-	-	40
10	Rawai hanyut	4	-	-	-	-	-	4
11	Pancing tonda	174	-	-	-	-	-	174
12	Pancing ulur	366	205	33	113	236	330	1,283
13	Bubu	9	-	-	-	-	-	9
Jumlah Total		1086	305	66	153	475	665	2,750

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi.

karena itu, tidak jarang satu rumpon digunakan untuk memancing lima sampai enam perahu meskipun dilakukan dengan cara bergilir.

Permasalahannya adalah pemancingan ikan Tuna dan Cakalang di rumpon tersebut saat ini terkendala dengan banyaknya nelayan pursein dari luar daerah (Sibolga, Pekalongan, Tegal, Cilacap dan lainnya) yang memasang rumpon di kawasan perairan sekitar 100 mil dari pantai. Permasalahan itu muncul karena nelayan dari luar daerah tersebut menggunakan lampu yang lebih kuat, sedangkan jarak dari rumpon nelayan lokal tidak begitu jauh. Akibatnya jumlah ikan yang berada di rumpon nelayan lokal semakin sedikit, karena karakteristik ikan adalah mendekat ke perairan yang lebih kuat penerangannya. Selain itu, nelayan dari luar juga menggunakan jaring pursein dengan mata jaring yang kecil, sehingga banyak ikan tuna yang masih kecil ikut tertangkap. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah ikan tuna hasil

tangkapan nelayan lokal menjadi semakin berkurang. Oleh karena itu, selain mereka mengharapkan agar ada pengaturan tentang jarak terdekat pemasangan antar rumpon, juga diharapkan ada pengaturan tentang besarnya mata jaring yang diperbolehkan.

Pemberdayaan Nelayan dalam Program Minapolitan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (termasuk nelayan), beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui program yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maupun program penunjang kegiatan lainnya seperti yang terdapat dalam program *Co-Fish (Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project)*, MCRMP (*Marine and Coastal Resources*

Management Project), PLBPM (Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) dan Coremap (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*), yang semuanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, sampai saat ini keberhasilan program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil masih dipertanyakan. Oleh karena itu, dicari alternatif lain untuk memberdayakan nelayan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui program Minapolitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan di dalam program Minapolitan di wilayah ini tidak fokus, tetapi bersifat menyebar. Hal itu dapat dilihat pada beberapa kegiatan pemberdayaan nelayan perikanan tangkap yang dijalankan di dalam program Minapolitan di Sukabumi, yaitu:

- (1) Pengembangan teknologi penangkapan ikan
- (2) Peningkatan usaha perikanan
- (3) Pelatihan SDM perikanan dan kelautan
- (4) Pengadaan kapal Inka Mina 2 unit
- (5) Bantuan *cool box* 1 paket
- (6) Bantuan kapal 2 GT (*congkren*) 12 unit
- (7) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
- (8) Bantuan keramba jaring apung 6 unit di Cibangan Ciselok dan Sangrawayang Kec. Simpenan
- (9) Bantuan beras bagi nelayan tidak melaut (*paceklik/cuaca buruk*) 66.192 kg
- (10) Penyediaan listrik hemat energi untuk nelayan 219 sambungan
- (11) Sertifikasi atas hak tanah nelayan 250 bidang tanah
- (12) Kredit nelayan pengusaha perikanan melalui Bank BRI, BTPN Syariah dan BJB

Program-program di atas memang ditujukan untuk pemberdayaan nelayan tangkap. Meskipun demikian, beberapa kegiatan sebetulnya tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pemberdayaan, seperti bantuan beras yang diberikan pada musim paceklik atau musim tidak dapat melaut dalam jangka waktu lama, lebih tepat disebut sebagai *charity* atau bantuan sosial-kemanusiaan. Hal itu karena pemberdayaan merupakan upaya untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, sebagaimana dikemukakan oleh Robert (2003).⁸

⁸Robert (2003) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take*

Mengingat komoditas ikan unggulan dalam program Minapolitan di Palabuhanratu adalah ikan Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur, maka pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan dalam program Minapolitan di wilayah ini semestinya juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menangkap empat jenis ikan komoditas unggulan tersebut. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa program-program bantuan yang diberikan kepada nelayan kecil ternyata tidak ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan menangkap jenis-jenis ikan unggulan tersebut. Beberapa program bantuan untuk nelayan kecil justru digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti perumahan dan kelistrikan. Jumlah kegiatan untuk pemberdayaan nelayan tangkap justru sangat sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan kegiatan program Minapolitan.

Dari 12 program pemberdayaan nelayan tangkap di atas, jika dicermati lebih lanjut hanya ada beberapa bantuan yang layak disebut pemberdayaan nelayan,⁹ yaitu pengembangan teknologi penangkapan ikan, bantuan kapal Inka Mina, bantuan kapal *Congkren*, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan kredit nelayan. Permasalahannya kemudian adalah, jenis-jenis kegiatan pemberdayaan tersebut ternyata tidak mendukung kebutuhan nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi, terutama untuk meningkatkan produksi ikan Tongkol, Cakalang, Tuna dan Layur yang menjadi target program Minapolitan di daerah ini. Kegiatan pemberdayaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan adanya tiga cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.¹⁰

action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.”

⁹Hal itu sesuai dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Cholisin (2011), yaitu di dalamnya terkandung tiga arti: *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat) dan *protecting* (melindungi masyarakat agar mampu bersaing dengan pihak lain).

¹⁰Tiga cara tersebut meliputi: pemberian skim kredit dengan cara yang mudah dan bunga pinjaman rendah; penyediaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan; penumbuh-

Program PUMP misalnya, yang merupakan program bantuan permodalan untuk pembelian peralatan penangkapan ikan yang diberikan kepada nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) dengan jumlah bantuan Rp 100 juta, hasilnya banyak yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh nelayan. Beberapa KUB memang mengalami perkembangan, seperti KUB Fajar Mandiri, yang berhasil mengembangkan dana bantuan yang diperoleh, namun beberapa KUB yang lain justru tidak berkembang. Hal itu karena anggota KUB menganggap bahwa dana bantuan itu merupakan bantuan cuma-cuma, sehingga tidak perlu melakukan setoran ke kelompok. Di sinilah peran tenaga pendamping ternyata belum optimal. Kondisi ini ditambah dengan adanya beberapa KUB yang bisa mendapatkan dana bantuan lebih dari satu kali, sementara beberapa KUB justru belum pernah mendapatkan bantuan.

Informasi dari beberapa anggota KUB menyatakan bahwa untuk mengajukan dana PUMP memang ada pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun, pendampingan itu hanya sebatas sampai dengan turunnya anggaran, seperti pendampingan untuk membuat proposal, memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha kelautan dan perikanan selama kegiatan usaha berlangsung, dan melakukan pendampingan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Begitu dana sudah diterima oleh kelompok, pendampingan sudah tidak ada lagi. Padahal menurut para anggota KUB, pendampingan tetap diperlukan walaupun dana sudah diterima, terutama dalam hal pengelolaan anggaran agar dana yang sudah diterima itu bisa lebih berkembang.

Permasalahan lain adalah bantuan permodalan disesuaikan dengan usulan anggota kelompok, yang antara lain untuk membeli peralatan tangkap seperti perahu motor dan sebagainya. Oleh karena jumlah dana bantuan yang bisa digunakan oleh anggota kelompok sangat terbatas, maka penggunaan dana untuk membeli perahu umumnya hanya yang berukuran kecil, yang tidak memadai untuk melaut sampai wilayah 100 mil dari pantai. Dengan perahu tersebut mereka hanya bisa menangkap dengan

kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan kecil dan koperasi perikanan.

menggunakan payang, atau menggunakan pancing ulur. Oleh karena itu, kalau dikatakan bisa mendukung program Minapolitan, itu hanyalah untuk penangkapan Layur. Dengan demikian, bantuan permodalan melalui PUMP ini tidak mendukung program Minapolitan perikanan tangkap di wilayah ini, yakni peningkatan hasil tangkapan Tuna, Cakalang, Tongkol dan Layur.

Walaupun nelayan Sukabumi memiliki kapasitas untuk mendukung program Minapolitan melalui penangkapan ikan Layur, namun penangkapan ikan Layur oleh nelayan Sukabumi juga dihadapkan pada kendala, yaitu kondisi perairan yang tercemar sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sehingga ikan Layur menjadi sulit diperoleh. Hal itu karena *fishing ground* untuk menangkap ikan Layur itu dijadikan jalur transportasi laut untuk pengangkutan batubara yang memasoknya ke PLTU. Dengan kondisi seperti itu maka bantuan teknologi penangkapan ikan maupun kapal Congkreng untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan Layur tidak banyak membantu masyarakat nelayan untuk mendukung program Minapolitan.

Program lain yang dianggap memberdayakan nelayan perikanan tangkap adalah Inka Mina, yang merupakan bagian dari program bantuan 1000 kapal yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, melalui upaya meningkatkan produksi perikanan dengan cara meningkatkan kapasitas kapal perikanan (restrukturisasi armada penangkapan ikan). Program Inka Mina dimulai pada tahun 2010, dan diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapal penangkap ikan berukuran 30 GT ke atas. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan, yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil, yang sebagian besar kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, melalui program ini diharapkan nelayan kecil mampu memiliki daya saing dan berdaulat di perairan negeri sendiri. Program Inka Mina memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- (1) Meningkatkan kemampuan jelajah operasi penangkapan ikan oleh nelayan hingga ke wilayah penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Laut Lepas;
- (2) Mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perairan pantai;
- (3) Meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan

teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, dan

- (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Permasalahan yang muncul terkait dengan program Inka Mina ini adalah biaya operasional kapal yang tidak bisa ditanggulangi oleh nelayan kecil, yang jumlahnya bisa mencapai Rp.100 juta untuk sekali pengoperasian. Akibatnya kapal itu tidak bisa dikelola oleh nelayan kecil dan pengelolaannya diserahkan kepada nelayan besar. Dengan demikian, walaupun bantuan kapal Inka Mina tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk mendukung program Minapolitan (terutama Tuna, Tongkol dan Cakalang), namun tidak mampu meningkatkan pendapatan nelayan kecil, sebagaimana tujuan dari program ini.

Permasalahan lain adalah terkait dengan budaya melaut yang dimiliki oleh nelayan kecil di daerah ini, yang tidak sesuai dengan budaya melaut yang dituntut dalam pengoperasian kapal Inka Mina. Hal itu karena nelayan di wilayah Sukabumi umumnya *one day fishing*, sementara untuk mengoperasikan Inka Mina nelayan dituntut untuk sehari-hari di atas kapal. Oleh karena itu, anak buah kapal Inka Mina banyak yang didatangkan dari luar daerah, sehingga keberadaan Inka Mina tidak memberi dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah ini. Memang dengan adanya kapal Inka Mina produksi ikan target (terutama Tuna, Cakalang dan Tongkol) bisa meningkat, namun peningkatan produksi itu tidak dirasakan manfaatnya oleh nelayan lokal.

Bantuan kredit nelayan dimaksudkan agar nelayan bisa mendapatkan dana untuk berbagai kepentingan mereka, melalui pinjaman dari bank, yang difasilitasi antara lain oleh Bank BRI dan BJB. Untuk memudahkan akses nelayan ke perbankan, nelayan dibantu oleh Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam membuat proposal dan memenuhi persyaratan yang diminta pihak bank. Untuk itu maka sebelum KKMB membawa proposal dari nelayan ke bank, KKMB melakukan verifikasi lebih dulu proposal yang dibuat oleh nelayan, dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Untuk mengantisipasi agar nelayan tidak mengalami kendala dalam membayar angsuran secara rutin ke bank, terutama pada musim paceklik, maka KKMB mengadakan

pendekatan ke pihak bank, agar pembayaran angsuran dapat disesuaikan dengan tingkat fluktuasi pendapatan nelayan. Jadi pada saat musim ikan nelayan akan membayar angsuran yang besar, sedangkan jika musim paceklik pembayaran angsuran bisa ditunda.

Melalui sistem ini, pihak bank akan menghitung jumlah pembayaran angsuran yang harus dilakukan oleh seorang nelayan dalam satu tahun, misalnya Rp.12.000.000,-. Untuk mengantisipasi musim paceklik di mana pada saat itu nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan, maka jumlah angsuran per bulan tidak dibagi 12 tetapi dibagi 9, dengan asumsi tiga bulan itu musim paceklik (nelayan tidak bisa melaut). Dengan cara demikian, nelayan akan bisa mengangsur rutin selama sembilan bulan, dan yang tiga bulan, karena musim paceklik, tidak perlu mengangsur. Sedangkan pihak bank tidak dirugikan, karena jumlah angsuran yang diterima oleh bank dalam setiap tahunnya tidak berkurang. Menurut informasi dari petugas KKMB, dengan cara demikian terbukti bahwa jumlah pinjaman yang tidak lancar (*non perform loan*) tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 5%. Kredit bank tersebut tentunya sangat membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan keuangan, terutama jika nelayan ingin mengembangkan peralatan tangkapnya. Meskipun demikian, tidak semua nelayan bisa mengajukan kredit, karena harus ada agunan, baik berupa akte tanah atau pun surat-surat berharga lainnya.

Selain program-program tersebut, beberapa program diklaim memberdayakan nelayan kecil di Kabupaten Sukabumi, seperti pelatihan kepada isteri-isteri nelayan, sertifikasi lahan, program listrik dan kartu nelayan. Beberapa jenis pelatihan diberikan kepada isteri-isteri nelayan untuk pengolahan ikan, seperti pembuatan abon ikan, bakso ikan dan pindang ikan. Walaupun program ini bermanfaat bagi keluarga nelayan perikanan tangkap, namun program ini tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari Minapolitan di Sukabumi, karena fokus Minapolitan di wilayah ini adalah perikanan tangkap. Selain itu, permasalahan lain adalah pelatihan yang diberikan tidak disertai dengan upaya mencari pasar. Akibatnya banyak isteri nelayan yang sudah ikut pelatihan tetap tidak bisa memproduksi karena tidak bisa menjualnya, kecuali hanya kalau ada pesanan.

Program sertifikasi lahan atau Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) yang dimaksudkan

agar bisa digunakan untuk agunan dalam peminjaman uang ke bank untuk modal kenelayan juga banyak nelayan yang belum tersentuh. Hal itu disebabkan nelayan yang tanahnya bisa disertifikasi hanya nelayan yang berada dalam satu blok permukiman, dengan alasan teknis untuk mempermudah pelaksanaannya. Akibatnya banyak nelayan yang permukimannya terpecah belum bisa dibuatkan sertifikasinya melalui program ini. Kondisi ini sangat disayangkan oleh nelayan, karena walaupun rumah mereka tidak berada di dalam satu blok permukiman, namun hal itu diharapkan tidak menjadi halangan bagi petugas untuk melakukan sertifikasi.

Kartu nelayan juga dinyatakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan nelayan, karena hanya dengan memiliki kartu itu nelayan bisa memperoleh bantuan. Artinya, jika tidak memiliki kartu nelayan, maka pemberian bantuan dalam bentuk apa pun tidak akan disampaikan ke nelayan tersebut. Melalui kartu tersebut diharapkan bantuan pembinaan dan bantuan kepada nelayan bisa tepat sasaran. Permasalahannya adalah pembuatan kartu nelayan harus dilengkapi KTP yang menunjukkan profesinya adalah nelayan. Hal itu menyulitkan nelayan, karena banyak nelayan yang matapencarian di KTP tidak ditulis sebagai nelayan, tetapi sebagai petani. Hal ini terjadi karena nelayan di daerah ini bukan nelayan murni yang mengandalkan pada kehidupan dari hasil laut. Pada musim gelombang, nelayan mencari sumber kehidupan di darat, termasuk di bidang pertanian; sedangkan bantuan program di bidang pertanian dengan penggunaan KTP untuk membentuk kelompok tani lebih dahulu berlangsung dibandingkan bantuan program nelayan. Oleh sebab itu, bisa dipahami jika KTP penduduk lebih banyak mencatumkan pekerjaan sebagai petani. Akibatnya banyak nelayan yang kesulitan membuat kartu nelayan. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa di wilayah Palabuhanratu baru ada sekitar 5.000 orang yang telah membuat kartu nelayan, dari jumlah nelayan keseluruhan sekitar 8.798 nelayan.

Program lain yang masuk kategori pemberdayaan nelayan dalam Minapolitan adalah pemberdayaan Pokwaswas, yaitu suatu sistem pengawasan sumber daya laut yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Melalui Pokwaswas, diharapkan agar masyarakat pesisir

dapat ikut partisipasi untuk melakukan pengawasan lingkungan laut, agar tidak terjadi kegiatan yang merusak lingkungan.

Program Pokwaswas sangat penting dalam mendukung Minapolitan, karena dengan lingkungan laut dan sumber daya perikanan yang baik maka produksi perikanan diharapkan akan bisa meningkat. Permasalahannya adalah kegiatan yang hanya berbentuk sosialisasi kepada masyarakat itu kurang menyentuh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Penutup

Program Minapolitan perikanan tangkap di Sukabumi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ikan unggulan, yaitu Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur. Melalui peningkatan produksi keempat jenis komoditas tersebut, diharapkan pendapatan nelayan di daerah ini juga meningkat.

Walaupun produksi empat jenis komoditas unggulan tersebut meningkat, namun ternyata peningkatan produksi tidak dari hasil tangkapan nelayan Sukabumi, tetapi dari nelayan pendatang. Hal itu terjadi karena terkendala oleh karakteristik nelayan lokal yang menjadi penyangga program. Peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan lokal umumnya hanya untuk perikanan pantai (*coastal fisheries*), sehingga hasil tangkapan nelayan lokal tidak mendukung komoditas hasil laut yang menjadi unggulan program Minapolitan di wilayah ini. Hal itu karena jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan program Minapolitan tersebut merupakan jenis-jenis ikan lepas pantai (*offshore fisheries*), yang penangkapannya kebanyakan dilakukan oleh nelayan dari luar daerah.

Kehadiran nelayan luar ini di satu sisi telah memberikan kontribusi pada program Minapolitan, tetapi sebaliknya tidak menguntungkan bagi nelayan lokal. Hal itu karena terjadinya persaingan alat tangkap yang tidak seimbang antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal, sehingga berakibat pada kurangnya hasil tangkapan ikan tuna oleh nelayan lokal.

Untuk memberdayakan nelayan kecil, semestinya program pemberdayaan di dalam Minapolitan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nelayan lokal dalam melakukan penangkapan ikan-ikan unggulan (Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur). Dengan kemampuan untuk menangkap ikan-ikan unggulan yang menjadi

komoditas utama dalam program Minapolitan, maka diharapkan pendapatan nelayan juga akan meningkat. Akan tetapi, hal itu justru tidak dilakukan di dalam program Minapolitan.

Program-program pemberdayaan di dalam program Minapolitan justru sangat umum, sehingga terkesan kurang fokus. Semua program yang terkait dengan masalah perikanan dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan, bahkan program yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perikanan tangkap dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan di daerah ini. Dengan cara pandang seperti itu, maka semua program dari Dinas Perikanan dan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara pelaksanaan program Minapolitan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Program Pembangunan Pesisir. Hal itu tentunya tidak sinkron dengan bentuk Minapolitan di kawasan ini, yang sejatinya berupa Minapolitan Perikanan Tangkap, yang tujuannya lebih terkait dengan peningkatan produksi perikanan tangkap, termasuk peningkatan kesejahteraan nelayan tangkap.

Hal itu tidak berarti bahwa keberadaan program Minapolitan tidak bermanfaat bagi nelayan lokal. Dengan adanya program ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam bantuan, mulai dari pengadaan listrik, sertifikasi tanah, hingga bantuan pelatihan dan permodalan. Akan tetapi, sangat disayangkan program-program bantuan itu tidak sejalan dengan tujuan program Minapolitan perikanan Tangkap di wilayah ini, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi ikan unggulan. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh nelayan lokal belum terhubung dengan tujuan program Minapolitan, yaitu meningkatkan hasil tangkapan yang berorientasi ekspor, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.

Daftar Pustaka

- Berkes, *et. al.* (2001). *Managing Small-scale Fisheries Alternative Directions and Methods*. Ottawa: International Research Centre.
- Buang, A., dkk. (2011). The Agropolitan Way of Re-Empowering the Rural Poor. *Worlds Applied Sciences Journal 13 (Special Issue of Human Dimension Development): 01-06*. IDIOSI Publication.
- Cholisin. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian di Lingkungan Kabupaten Sleman.
- Dewa Gede Raka. (2011). *Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah*. Makalah disajikan pada Workshop Penyiapan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang di Kabupaten Tematik (22–23 November) di Kampus Institut Teknologi Malang.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2002). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2000*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. (2011). *Penyusunan Business Plan Kawasan Penunjang Minapolitan Palabuhanratu dan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi*.
- Douglass, M. (1981). *Agropolitan Development: An Alternatif for Regional in Asia*. Paper was presented at the Annual Conference on Development Studies Association of Reading University, 1979. In: *Nepal Geographical*, Vol 13. 1981.
- Friedmann, I & Douglass, M. (1978). Agropolitan development toward a new strategy to regional planning in Asia. dalam F. Lo & K. Salih (Eds.) *Growth pole Strategy and Regional Development Policy* (hlm. 163-192). Oxford: Pergamon Press.
- Garcia, S.M. & Rosenberg, A.A. (2010). Food Security and Marine Capture Fisheries: Characteristics, Trends, Drivers and Future Perspectives. *Philosophical Transactions of The Royal Society B*, 365, 2869-2880.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Surat

- Keputusan Menteri Pertanian tahun 1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
- PT. Belaputera Interplan. (2011). *Buku Laporan Penyusunan Masterplan Kawasan Penunjang Minapolitan Kabupaten Sukabumi*. Sukabumi: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Robert, A. (2003). *Social Work and Empowerment*. New York, Palgrave MacMillan
- Suhaeni, Siti, dkk. (2014). The Empowerment Model of Skipjack Tuna Fish (Cakalang Fufu) Processing Small Industry in Bitung City. *Journal of Research in Environmental and Earth Science*. 1 (4), 9-15.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Nomor 523/526.i/Dislutkan 2013 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya kelautan dan Perikanan dan Sejenisnya (Kelompok Masyarakat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan).
- Tri Wiji Nurani, Ardani, Lubis, E. (2014). Peluang Pasar Ekspor Komoditas Ikan Layur dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Jawa Barat, dalam *Prosiding Seminar Nasional Ikan ke 8*. Bogor, Fakultas Perikanan Insitut Pertanian Bogor
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

